



KKP
2025 #RISETOGETHER

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

TRIWULAN II
TAHUN 2025



DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2025

Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil, S.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	11
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2025 Budidaya.....	16
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025	16
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2. Analisis Capaian Kinerja Ikan Air Laut.....	21
SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	21
IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT .	21
IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT.....	23
IKSK 3. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	24
IKSK 4. Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	27
IKSK 5. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT	29
IKSK 6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut Yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB).....	30
IKSK 7. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	34
IKSK 8. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji.....	32
IKSK 9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	35
IKSK 10. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji.....	36
IKSK 11. Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) Yang Diuji	38
IKSK 12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya.....	40
IKSK 13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.....	42

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	43
IKSK 14. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	43
IKSK 15. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	45
IKSK 16. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	50
IKSK 17. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut	52
IKSK 18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.	53
IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	56
IKSK 20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	57
BAB IV. PENUTUP	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	12
Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang Pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	13
Gambar 3. Potensi Perikanan Budi Daya.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	17
Gambar 7. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerja Triwulan II Tahun 2025	18
Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I 2025.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	19
Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT	21
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional pada tiap UPT	22
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT .	24
Tabel 5. Capaian Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat.....	25
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat	25
Tabel 7. Capaian Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat.....	28
Tabel 8. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang Diproduksi untuk Operasional UPT	30
Tabel 9. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB).....	31
Tabel 10. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	32
Tabel 11. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan II Tahun 2025	33
Tabel 12. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji	34
Tabel 13. Rincian Target Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025.....	35
Tabel 14. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	36
Tabel 15. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	37
Tabel 16. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji di BPKIL Serang Triwulan II Tahun 2025.....	37
Tabel 17. Capaian Sampel Surveilans <i>Anti Microbial Resistance</i> (AMR) yang Diuji.....	39
Tabel 18. Rincian Target dan Realisasi Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Triwulan I Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB	39
Tabel 19. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	41
Tabel 20. Capaian Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.....	42
Tabel 21. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	44
Tabel 22. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	49
Tabel 23. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	51

Tabel 24. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	52
Tabel 25. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan II Tahun 2025	53
Tabel 26. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	54
Tabel 27. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	56
Tabel 28. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Triwulan II Tahun 2025, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025:

a) Terdapat 10 (sepuluh) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya telah melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut, dengan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu: (i) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (Ekor), (ii) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor), (iii) Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor), (iv) Sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji (Sampel), (v) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel), (vi) Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel), (vii) Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (Sampel) dan (viii) Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : (i) Indeks profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks) dan (ii) Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen).

b) Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya belum dapat diukur pada triwulan I, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (i) Produksi Calon Induk Kepiting untuk operasional UPT (Ekor), (ii) Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB) (Unit), (iii) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan), (iv) Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang) dan (v) Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu : (i) Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai), (ii) Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (iii) Persentase

Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (iv) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) dan (v) Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 50% Indikator Kinerja telah melampaui target triwulan yang ditetapkan dan 50% Indikator Kinerja yang capaiannya belum dapat diukur pada Triwulan II. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “**Istimewa**” dengan nilai **110,93**. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 2.869 ekor di BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPIUUK Karangasem;
2. **IKU 3. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih ikan air laut sebanyak 925.850 ekor oleh beberapa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu: BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPIUUK Karangasem, BPBAP Takalar dan BPBL Batam;
3. **IKU 5. Benih Kepiting Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih kepiting sebanyak 125.000 ekor oleh BPBAP Takalar;
4. **IKU 6. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT (Kg)**, telah diproduksi pakan ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 1.530 Kg oleh BBPBL Lampung;
5. **IKU 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)**, telah dilakukan pelayanan pengujian parameter penyakit ikan air laut sebanyak 3.645 sampel di beberapa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
6. **IKU 9. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel pakan ikan air laut sebanyak 22 sampel di BBPBL Lampung;
7. **IKU 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel parameter penyakit ikan air laut sebanyak 58 sampel di BPKIL Serang;
8. **IKU 12. Sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) sebanyak 67 sampel di beberapa laboratorium UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam;
9. **IKM 16. Indeks profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)**, telah dilakukan upaya pengembangan profesionalitas ASN oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut sehingga mendapatkan indeks sebesar 77,90;

10. **IKM 18. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap temuan dan saran dari LHP Itjen oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut pada periode triwulan I Tahun 2025 sehingga mendapatkan capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan sebesar 87,50%.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2025, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

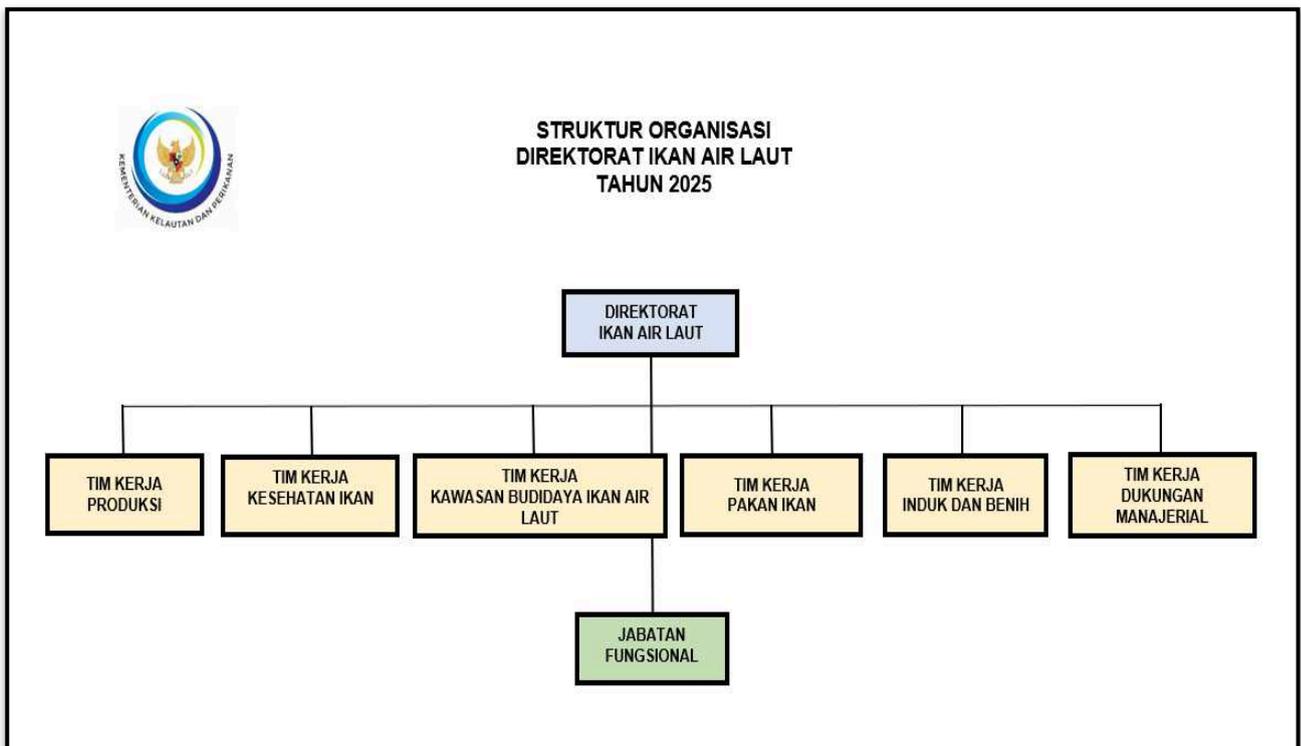
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama Triwulan II tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

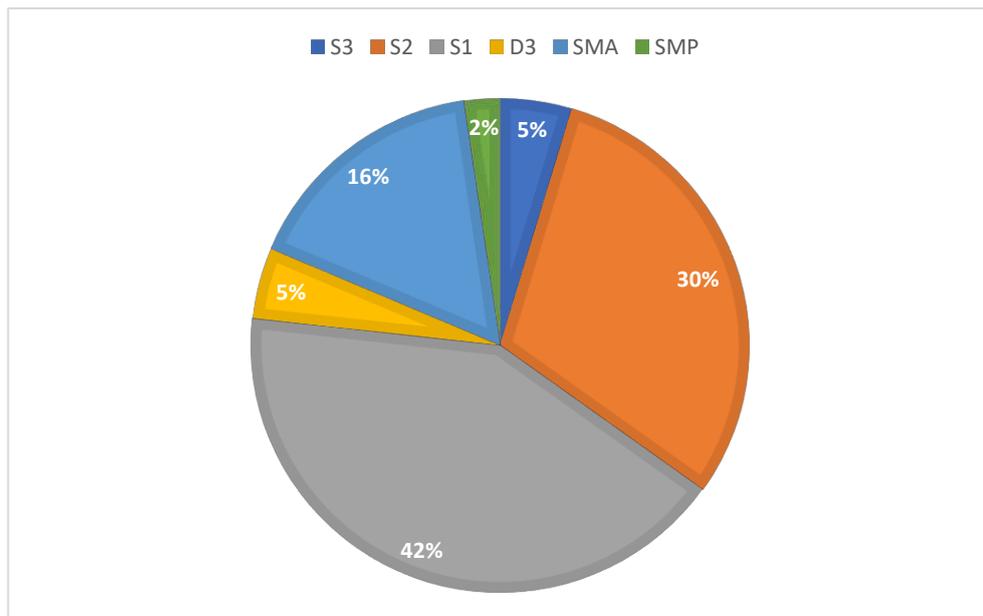
- 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 5%, S2 sebanyak 30%, S1 sebanyak 42%, D3 sebanyak 5%, SMA sebanyak 16% dan SMP sebanyak 2%.



Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 48 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil 34 orang,
- Pegawai PPPK 4 orang dan
- Pegawai Tenaga Kontrak 5 orang.

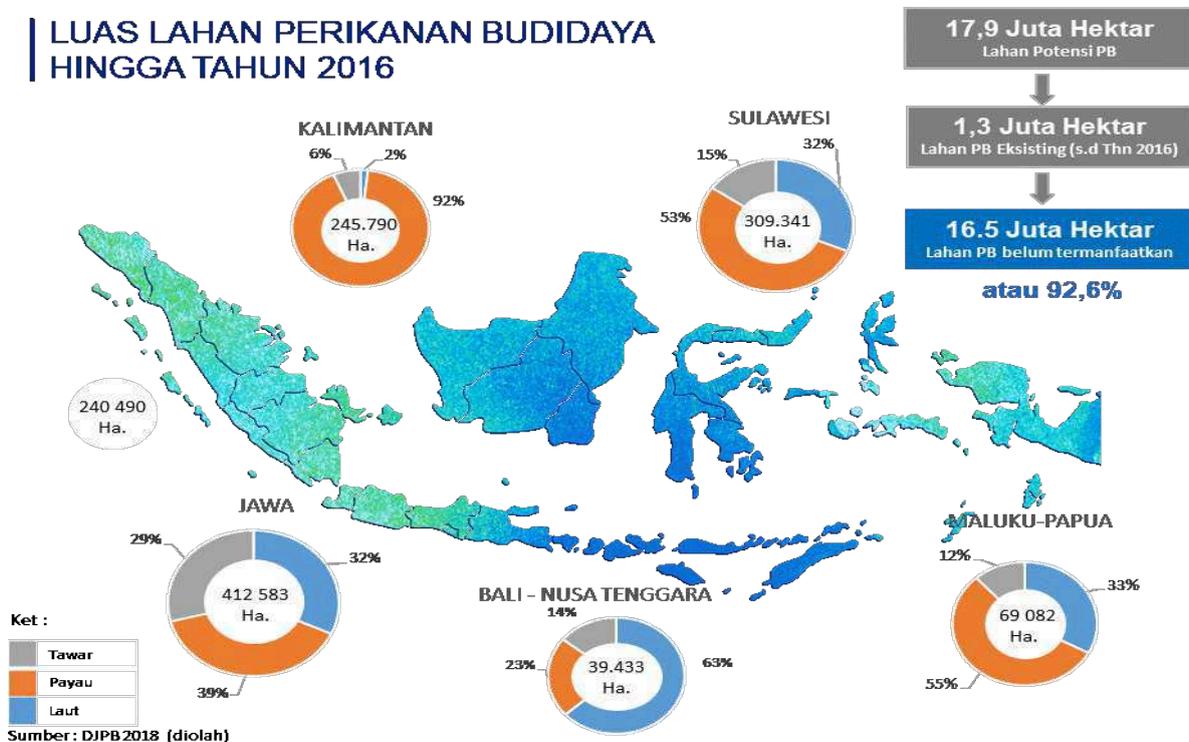
Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Ikan Air Laut tersebar di Timja Dukungan Manajerial sebanyak 4 (empat) orang dan Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut 1 (satu) orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen

untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

LUAS LAHAN PERIKANAN BUDIDAYA HINGGA TAHUN 2016



Gambar 3. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat

pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJ Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang pencapaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 selama kurun waktu Januari – Maret 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025. Sasaran Kegiatan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 adalah Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Kamil
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Pihak Pertama Direktur Ikan Air Laut
--	---

 <p>Ditandatangani Secara Elektronik Tb. Haeru Rahayu</p>	 <p>Ditandatangani Secara Elektronik Ikhsan Kamil</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037
		2. Produksi Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89
		3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489
		4. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574
		5. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927
		6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CPIB, CBIB) (Unit)	16
		7. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976
		8. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17
		9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
		10. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70
		11. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75
		12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000
		13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	14. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84
		15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85
		18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70
		20. Persentase Penyelesaian SOP Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	6.554.122.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	358.000.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025		6.912.122.000

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut

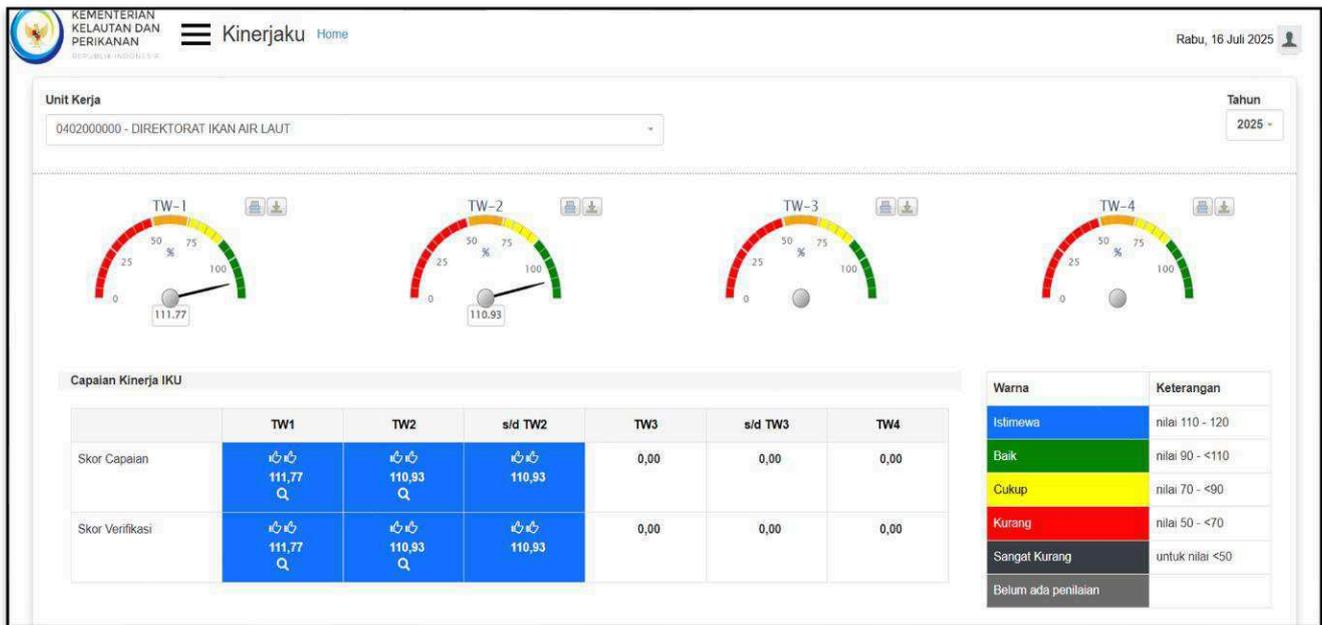

 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Ikhsan Kamil

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan II Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembudidayaan Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 10 (sepuluh) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 9 (sembilan) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW II	Realisasi TW II	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037	Triwulan	2.167	2.869	132,4
		2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89	Tahunan			
		3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489	Triwulan	403.250	925.850	229,6
		4. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574	Triwulan	78.558	125.000	159,1
		5. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927	Triwulan	1.500	1.530	102
		6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) (Unit)	16	Tahunan			
		7. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976	Triwulan	524	3.645	695,6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW II	Realisasi TW II	%
		8. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17	Triwulan	7	22	314,3
		9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6	Tahunan			
		10. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70	Triwulan	20	58	290
		11. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75	Triwulan	15	67	446,7
		12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000	Tahunan			
		13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1	Tahunan			
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	14. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84	Tahunan			
		15. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81	Semesteran	74	77,90	105,3
		16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100	Tahunan			
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85	Triwulan	85	87,50	102,9
		18. Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80	Tahunan			
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70	Tahunan			
		20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65	Tahunan			

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan budi daya yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 14 Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada indikator tersebut dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem. Produksi calon induk unggul ikan air laut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT lingkup DJPB.

Target indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 10.037 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	10.037	2.167	2.869	132,4	28,58

- **Capaian Kinerja**

Pada tabel diatas realisasi TW II pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 2.869 ekor dari target TW II yakni 2.167 sedangkan pada target tahunan 10.037 ekor. Pada penghitungan realisasi TW II

tersebut, capaian triwulan kedua pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 132,4%, sedangkan capaian mencapai 28,58% pada target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi dan capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional masing-masing UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi dan capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional pada tiap UPT.

No	Nama UPT	Target 2025	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	1.351	0	0	0
2	BPBAP Situbondo	4.453	0	0	0
3	BPBAP Ujung Batte	199	0	0	0
4	BPBL Ambon	1.142	378	378	135%
5	BPBL Batam	1.820	2.206	2.206	121%
6	BPBL Lombok	948	50	50	100%
7	BPIUUK Karangasem	124	235	235	350%
Total		10.037	1.875	2.869	132%

Pada tabel diatas diketahui bahwa IKU produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional pada 7 UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 berbeda-beda, produksi calon induk unggul pada ikan air laut tertinggi dihasilkan oleh BPIUUK Karangasem dengan prosentase capaian sebesar 350%, BPBL Ambon sebesar 135%, BPBL Batam sebesar 121%, dan BPBL Lombok sebesar 100%, sedangkan pada BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, dan BPBAP Ujung Batte belum ada produksi. Data tersebut menunjukkan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan tata kelola budi daya yang diterapkan oleh setiap balai terkait teknis penanganan komoditas, perbedaan jenis komoditas budi daya. Perbedaan jenis komoditas ikan air laut yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calon induk yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rencana tindak lanjut yang dilakukan pada periode selanjutnya dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas calon induk unggul ikan air laut yang dihasilkan antara lain melalui penerapan biosecurity di lingkungan budi daya secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan yang tepat, pakan yang diberikan harus

memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan diberikan secara tepat ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate calon induk ikan air laut, dan mengoptimalkan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di satker tersebut. Untuk menghasilkan calon induk yang unggul dilakukan juga upaya peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk.

Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW II pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT pada masing-masing satker antara lain : BBPBL Lampung mencapai Rp 139.703.394 (38,29%) dari pagu Rp 364.794.000, BPBAP Situbondo mencapai Rp 43.395.000 (68,61%) dari pagu Rp 63.244.000, BPBAP Ujung Batte mencapai 0 (0%) dari pagu Rp 53.730.000, BPBL Ambon mencapai Rp 305.968.000 (100%) dari pagu Rp 305.968.000, BPBL Batam mencapai Rp 248.165.000 (64,45%) dari pagu Rp 385.000.000, BPBL Lombok mencapai Rp 42.470.000 (16,59%) dari pagu Rp 255.960,000 dan BPIUUK Karangasem mencapai Rp 1,350,000 (45%) dari pagu Rp 3,000,000.

IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT merupakan salah satu kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang bertanggungjawab pada pelaksanaan indikator tersebut adalah BBPBAP Jepara. Produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul kepiting yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT tersebut.

Target indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 89 ekor, dimana pada TW II tidak ada target dan dilakukan pengukuran capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Capaian indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	89	-	-	-	-

Capaian kinerja pada produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT pada triwulan II masih 0. Hal ini dikarenakan masih proses pemeliharaan calon induk unggul kepiting.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT di Timja Induk dan Benih Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi pada kegiatan produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT belum ada capaian karena masih dalam proses pemeliharaan calon induk kepiting. Pada triwulan II belum ada kendala yang dihadapi atas rencana aksi pada kegiatan produksi calon induk kepiting.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya pada kegiatan produksi calon induk kepiting yaitu mengumpulkan data terkait calon induk unggul kepiting pada BBPBAP Jepara. Akan tetapi untuk pelaksanaan di lapangan tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan pengamatan pertumbuhan serta meningkatkan ketersediaan pakan alami untuk kebutuhan calon induk kepiting.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW II pada indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT mencapai Rp 2.365.000 (71,02%) dari pagu Rp 3.330.000.

IKSK 3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator jumlah benih ikan air laut yang direncanakan untuk disalurkan ke masyarakat, yang

berhasil disalurkan secara aktual. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penyaluran benih ikan air laut dalam mendukung pembudidayaan ikan oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem.

Target indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 1.774.489 ekor. Kriteria pelaksanaan kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat tertuang dalam Kepdirjend Perikanan Budi Daya no 311 beserta perubahannya tentang petunjuk teknis bantuan benih ikan lingkup UPT DJPB tahun 2025. Target indikator bantuan benih ikan air laut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	1.774.489	403.250	925.850	229,6	52,17

Pada tabel diatas realisasi TW II pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah terlaksana dengan baik dimana realisasi sudah mencapai 925.850 ekor dari target TW II 403.250 ekor. Pada penghitungan realisasi TW II tersebut, capaian triwulan kedua pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 229,6%, sedangkan capaian mencapai 52,17% pada target tahunan. Capaian pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi dan capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Nama UPT	Target 2025	Capaian Volume TW II	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	515.495	253.900	49,25
2	BPBAP Takalar	19.073	5.400	28,31

No	Nama UPT	Target 2025	Capaian Volume TW II	Capaian (%)
3	BPBAP Ujung Bate	84.586	185.650	219,48
4	BPBL Ambon	423.586	150.500	35,52
5	BPBL Batam	384.261	133.000	34,61
6	BPBL Lombok	269.531	196.400	72,86
7	BPIUUK Karangasem	77.957	1.000	1,28
Total		1.774.489	925.850	52,17

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pada data diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada triwulan II sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada satker BPBAP Ujung Bate memiliki persentase capaian tertinggi diantara satker lain, sedangkan presentase terendah pada sakter BPIUUK Karangasem. Perbedaan target dan nilai realisasi bantuan benih ikan air laut disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan pada tiap satker dan masyarakat penerima bantuan. Pada triwulan II satker BBPBL Lampung sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 253.900 ekor kepada 9 kelompok penerima dengan komoditas bawal bintang, kobia, kakap putih, kerapu bebek, kerapu macan, dan clownfish.

Pada satker BPBAP Takalar sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 5.400 ekor kepada 2 kelompok penerima dengan komoditas kakap. Pada satker BPBAP Ujung Bate sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 185.650 ekor kepada 8 kelompok penerima dengan komoditas kakap putih. Pada satker BPBL Ambon sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 150.500 ekor kepada 11 kelompok penerima dengan komoditas kakap putih dan clownfish. Pada satker BPBL Batam sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 133.000 ekor kepada 35 kelompok penerima dengan komoditas bawal bintang dan kakap putih. Pada satker BPBL Lombok sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 196.400 ekor kepada 14 kelompok penerima dengan komoditas bawal bintang, kakap putih, dan tiram mutiara. Pada satker BPIUUK Karangasem sudah menyalurkan benih ikan air laut dengan volume 1.000 ekor kepada 1 kelompok penerima dengan komoditas abalon.

Perbedaan komoditas unggulan yang dibudidayakan tiap UPT akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis. Pada proses produksi benih ikan konsumsi, selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih.

Kendala yang dihadapi atas rencana aksi triwulan II pada kegiatan bantuan benih ikan air laut ke masyarakat yaitu kurangnya kelompok pembudidaya yang mau menerima bantuan ikan air laut terutama bantuan benih kerang abalon, ketersediaan induk unggul (abalon dan mutiara) masih kurang, selain itu benih yang di produksi dari hasil breeding masih kurang. Selain itu juga terdapat kendala kurangnya kelengkapan administrasi proposal yang diusulkan oleh pokdakan. Sedangkan untuk UPT yang lain tidak ada kendala yang dihadapi untuk kegiatan bantuan benih ikan air laut, hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya target yang sudah ditentukan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada Direktorat Ikan Air Laut yaitu pengumpulan data penerima bantuan benih ikan air laut pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Upaya teknis yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator salah satunya melakukan pemeliharaan budi daya benih ikan air laut dengan baik serta menerima usulan permohonan bantuan benih ikan air laut dari masyarakat dan melakukan koordinasi dengan calon penerima terkait kelengkapan usulan proposal. Tindak lanjut terkait kendala abalon dan tiram mutiara yaitu melakukan diskusi dan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan. Rencana tindak lanjut terkait anggaran yaitu berkoordinasi dengan eselon I untuk pembukaan blokir anggaran jika memungkinkan. Tindak lanjut pada operasional budi daya benih peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui penerapan biosecurity di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat. Pada grading benih dilakukan dengan tepat secara ukuran dan jumlah sehingga berdampak pada peningkatan survival rate benih, dan mengimplementasikan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budi daya benih.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW II pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing satker antara lain : BBPBL Lampung mencapai Rp 925.031.661 (29,91%) dari pagu Rp 3.092.968.000, BPBAP Takalar mencapai Rp 102.844.345 (89,87%) dari pagu Rp 114.438.000, BPBAP Ujung Batte mencapai Rp 173.003.300 (34,09%) dari pagu Rp 335.172.000, BPBL Ambon mencapai Rp 924.686.704 (69,56%) dari pagu Rp 1.329.391.000, BPBL Batam mencapai Rp 666.519.001 (58,00%) dari pagu Rp 1.149.181.000, BPBL Lombok mencapai Rp 592.772.009 (55,04%) dari pagu Rp 1.076.900.000, dan BPIUUK Karangasem mencapai Rp 185.754.193 (49,98%) dari pagu Rp 371.675.000.

IKSK 4. Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat adalah bantuan pemerintah dengan perhitungan jumlah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat

sesuai dengan kelompok penerima yang sudah ditetapkan. Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis tinggi. Indikator benih kepiting yang disalurkan kepada masyarakat digunakan dalam efektifitas dan efisiensi penyaluran benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dalam mendukung pembudidayaan kepiting oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh BPBAP Takalar sebagai penanggungjawab pelaksana bantuan.

Target indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 174.574 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target BPBAP Takalar.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Capaian Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	174.574	78.558	125.000	159,12	71,60

Pada tabel diatas realisasi TW II pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik yakni mencapai 125.000 ekor dari target TW II 78.558 ekor. Pada penghitungan persentase realisasi TW II tersebut, capaian triwulan II pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 159,12%, sedangkan capaian mencapai 71,60% pada target tahunan. Data penerima bantuan benih kepiting ada triwulan ini yaitu 2 kelompok yakni Perairan Mappakalombo dan Nikarannuang dengan ukuran benih 2-3 cm.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja induk dan benih pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi atas kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan II sudah dilaksanakan dengan baik, dimana persentase capaian mencapai 159,12% pada target triwulan II.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan bantuan benih kepiting pada BPBAP Takalar yaitu faktor alam dimana kondisi perairan fluktuatif yang menyebabkan produksi

menurun. Selain itu kurangnya pembudidaya rajungan/kepiting sehingga benih yang di produksi digunakan untuk restocking.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada TW selanjutnya yaitu melakukan produksi benih kepiting. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menghasilkan benih kepiting yang tepat kualitas, kuantitas maupun waktu, dengan memanfaatkan berbagai faktor yang diduga berpengaruh positif, antara lain dengan aplikasi pakan yang memenuhi standar nutrisi.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Capaian anggaran pada TW I pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp 0 (0%) dari pagu anggaran Rp 174.574.000.

IKSK 5. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembang biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: 1) pakan ikan terapung; 2) pakan ikan melayang; dan 3) pakan ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: (1) cair; (2) pasta; (3) tepung; (4) kapsul; (5) remah; dan (6) pellet.

Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria:

- disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;
- penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan
- formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi.

Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan salah satu program dari DJPB untuk memproduksi secara mandiri pakan ikan yang akan dimanfaatkan oleh UPT itu tersebut. Satker yang melaksanakan indikator tersebut yaitu BBPBL Lampung. Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh satker untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya ikan air laut. Indikator diukur guna mengoptimalkan unit produksi pakan ikan air laut, memaksimalkan penggunaan bahan baku pakan ikan yang tersedia dan menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi.

- **Capaian Kinerja**

Target tahun 2025 pada indikator ini yaitu 13.927 kg dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	13.927	1.500	1.530	102	10,99

Pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT dalam hal ini BBPBL Lampung pada TW II ini telah mencapai 1.530 kg dengan presentase capaian terhadap TW II 102% dan 10,99% terhadap capaian tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Dalam produksi pakan TW II ini tidak terdapat kendala, bahkan produksi pakan melebihi target TW II.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu proses menyusun rencana pengadaan bahan baku dan persiapan mesin pakan untuk produksi pakan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap di TW II pada produksi pakan untuk operasional UPT di BBPBL Lampung mencapai Rp. 81.075.000 dari pagu Rp 181.900.000.

IKSK 6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari :

- 1) Pembinaan CBIB adalah pembinaan cara budidaya ikan yang baik untuk unit budi daya ikan air laut agar hasil produksi perikanan budidayanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke sistem OSS. Pada saat ini, penerapan CBIB bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Pembinaan CPIB adalah pembinaan cara pembenihan ikan yang baik yang dilakukan terhadap seluruh unit budi daya ikan air laut yang memproduksi benih ikan sehingga induk dan benih yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Pembinaan CBIB dan CPIB pada unit budidaya ikan air laut dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sedangkan sertifikasi CBIB dan CPIB dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

- **Capaian Kinerja**

Target tahunan Indikator kinerja Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) adalah sebanyak 16 (Unit) dan pada Triwulan II belum ada realisasi dikarenakan pengukuran capaian dilaksanakan pada akhir tahun.

Tabel 9. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	16	0	0	0	0

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi pada kegiatan Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) belum ada capaian karena masih

dalam proses perencanaan dan koordinasi pihak terkait. Pada triwulan II belum ada kendala yang dihadapi atas rencana aksi pada kegiatan Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB).

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Penyuluh Perikanan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Capaian anggaran pada TW II pada Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) sebesar Rp 0 (0%) atau belum ada realisasi dari pagu anggaran Rp 54.122.000.

IKSK 7. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh 4 UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 1.967 sampel dan pada triwulan II sebanyak 524 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok.

Tabel 10. Capaian Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	1.976	524	3.645	695,6	184,46

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi TW II, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 3.645 sampel atau mencapai

695,6%, terhadap target tw II sedangkan capaian tahunan mencapai 184,46% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan indikator baru pada Timja Kesehatan Ikan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memiliki target tahunan sebesar 1.976 (Sampel) dan realisasi triwulan II sebesar 3.645 sampel yang berasal dari layanan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan di 4 UPT DJPB yang mencakup sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 11. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	BPBL Batam	744	150	777	104.43
2	BBPBL Lampung	549	135	779	141.89
3	BPBL Lombok	374	136	1.645	442.25
4	BPBL Ambon	309	103	435	140.78
Jumlah :		1,976	524	3.645	184.46

Kendala yang ada pada pencapaian Indikator tersebut pada triwulan II yaitu, 1) terdapat beberapa UPT yang anggaran masih terblokir dan masih proses buka blokir anggaran, 2) tidak terdapat anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pengambilan sampel.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target pada triwulan selanjutnya yaitu 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian sampel di masing-masing laboratorium dan 2) Melakukan proses buka blokir anggaran dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW II dari satker BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok yang melaksanakan indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebesar Rp. 254.284.287,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 651.062.000,- atau mencapai 39,06% anggaran terserap.

IKSK 8. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah pengujian nutrisi dan mutu pakan ikan. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofurantoin, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji dilaksanakan oleh BBPBL Lampung.

- **Capaian Kinerja**

Indikator pakan ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 17 (Sampel) dan realisasi triwulan I sebanyak 22 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BBPBL Lampung yang dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 12. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	17	7	22	314,29	129

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator sampel pakan ikan air laut yang diuji merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Sampel pakan ikan air laut yang di uji di BBPBL Lampung pada TW II ini telah mencapai 22 sampel dengan presentase capaian terhadap TW II sebesar 314,29% dan 129% terhadap capaian tahunan. Kegiatan pengujian sampel pakan ikan air laut ini tidak terdapat kendala, bahkan telah melebihi target TW II dan target tahunan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu menyiapkan bahan untuk pengujian sampel dan melakukan perawatan terhadap alat-alat di laboratorium.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap di TW II pada kegiatan sampel pakan yang diuji di Laboratorium BBPBL Lampung sebesar Rp. 6.044.000 dari pagu Rp. 8.993.000.

IKSK 9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. Rekomendasi Kebijakan di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu Kebijakan di bidang residu dan bidang penyakit ikan.

Target Rekomendasi Kebijakan yang akan dihasilkan pada Tahun 2025 sebanyak 6 (Rekomendasi Kebijakan). 6 rekomendasi kebijakan tersebut, yaitu: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan dokumen RSNI bidang produksi dan kesehatan ikan. Target dan Realisasi Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Rincian Target Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025

No	Rekomendasi Kebijakan	Target	Produk
1	Bidang Kesehatan Ikan	3	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (1), • Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2) dan
2	Bidang Pembudidayaan Ikan	3	<ul style="list-style-type: none"> • KLHS Budidaya Ikan Nila salin (1) • Road map budidaya Laut (1) • Juknis/SOP Budi Daya Laut (1)
	Total	6	

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut sebagaimana terlihat pada Tabel. 16.

Tabel 14. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
-	-	6	-	-	-	-

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Penetapan kebijakan Tata Kelola bidang budi daya ikan air laut ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target ini didasarkan dari pentingnya penetapan Kebijakan tersebut dalam kegiatan Budi Daya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target yaitu dengan melakukan koordinasi stakeholders terkait untuk menghasilkan draft kebijakan yang dibutuhkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran untuk menunjang tercapainya indikator tersebut dianggarkan sebanyak Rp. 987.237.000.- dan sudah terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 317.390.824 atau sekitar 32,15% pada triwulan II.

IKSK 10. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah sampel hasil kegiatan monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang dan diujikan di laboratorium. Target merupakan sampel hasil monitoring pada sentra-sentra budi daya ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 70 sampel dan pada triwulan II sebanyak 20 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BPKIL Serang.

Tabel 15. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	70	20	58	290	82,86

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi TW II, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 58 sampel atau mencapai 290%, terhadap target tw II sedangkan capaian tahunan mencapai 82,86% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji pada tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji telah dilaksanakan pengujian pada 58 sampel di BPKIL Serang, sampel berasal dari sampel pada saat uji lapang. Kendala atas rencana aksi yang telah dilakukan adalah data yang disampaikan masih berupa angka lempeng total (ALT) dan matrik yang diuji masih berupa air laut.

Tabel 16. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang Triwulan II Tahun 2025

No.	Laboratorium Pengujian UPT	Ruang Lingkup	Target Tahunan (Sampel)	Target TW II (Sampel)	Realisasi TW II (Sampel)
1	BPKIL Serang	Monitoring Penyakit Ikan Air Laut	70	20	58
TOTAL			70	20	58

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya yang diharapkan bisa dilaksanakan pada indikator Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji, yaitu 1) Laboratorium BPKIL Serang perlu menambah matrik pengujian seperti daging ikan dan/atau hewan laut lainnya dan diperlukan juga penambahan parameter pengujian selain angka lempeng total bakteri, parameter yang

lebih fokus terhadap pengujian penyakit, 2) melakukan perencanaan kegiatan monitoring pada triwulan selanjutnya melibatkan pemerintah daerah (kolaborasi) dan 3) Memprioritaskan kegiatan monitoring penyakit ikan air laut pada sentra budi daya ikan dengan mengedepankan kerugian ekonomis yang dialami oleh pembudidaya ikan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW II pada Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang mencapai Rp. 56.127.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- atau mencapai persentase 40% anggaran yang telah terserap.

IKSK 11. Sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji

Indikator Sampel *Surveilans Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilans AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloxacin.

Tabel 17. Capaian Sampel *Survailan Anti Microbial Resistance (AMR)* yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	75	15	67	446,7	89,3

- Capaian Kinerja**

Indikator Sampel Survailan Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan pada judul dan cara pengukuran penilaian dari tahun 2024. Indikator Pengujian sampel Survailan AMR untuk komoditas ikan air laut dilaksanakan di 4 UPT- DJPB yaitu di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok, dengan target indikator kinerja tahunan sebanyak 75 (sampel) dan pada triwulan II sudah terdapat realisasi pengujian sampel AMR sebanyak 67 sampel.

Tabel 18. Rincian target dan realisasi sampel survailan resistensi antimikroba Triwulan II Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	26	27	103,85
2	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	16	19	118,75
3	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	16	8	50
4	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	17	13	76,47
Total		75	67	71,33

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
	BBPBL Lampung	26	Kerapu	8	11
			Kakap	9	7
			Bawal	9	9
	BPBL Batam	16	Kerapu	5	6
			Kakap	8	9
			Bawal	3	4
	BPBL Lombok	16	Kakap	8	4
			Bawal	8	4
	BPBL Ambon	17	Kerapu	4	3
			Kakap	4	3
			Kuwe	9	7

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
Total				75	67

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan cara pengukuran penilaian dari tahun 2024. Pada tahun 2024 pengukuran dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji telah dilaksanakan pengujian oleh BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok sehingga terealisasi sebanyak 67 sampel yang telah diuji. Kendala yang ada pada pencapaian Indikator tersebut pada triwulan II ini yaitu, 1) terdapat beberapa UPT yang anggaran sebelumnya terblokir dan baru diaktifkan, 2) tidak terdapat anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pengambilan sampel AMR, sehingga realisasi anggaran sampai triwulan II di 4 UPT tersebut masih belum ada capaian dan pengujian dilakukan menggunakan sisa bahan uji dari anggaran tahun sebelumnya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya yang diharapkan bisa dilaksanakan pada Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji, yaitu 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian sampel Surveilans AMR untuk komoditas ikan air laut dan melakukan maintenance untuk alat-alat pengujian di masing-masing laboratorium dan 2) Memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendukung capaian target dari iku ini.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW II pada Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di oleh BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok mencapai Rp. 0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 68.625.000,- atau mencapai persentase 0% anggaran yang telah terserap.

IKSK 12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Diseminasi adalah penyebaran ide, gagasan dan sebagainya. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah kegiatan pelatihan atau pembimbingan yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu.

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan Kegiatan yang dapat berupa Sosialisasi, Diseminasi dan Bimtek terkait kebijakan, program kerja, bantuan pemerintah, penerapan inovasi teknologi dan kompetensi dalam bidang Perikanan Budi Daya yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan tercapainya indikator kinerja tersebut diharapkan penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan baik, terimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 19. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	11.000	-	-	-	-

Pada tabel diatas realisasi TW II pada Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya masih belum ada realisasi, karena pengukuran capaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan indikator baru pada Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 11.000 (orang) yang telah disampaikan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek. Pada triwulan II capaian ini belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi progres untuk kegiatan ini tetap dilakukan yaitu melakukan penyiapan-penyiapan dokumen terkait dengan kebijakan perikanan budidaya.

Kendala atas rencana aksi pada indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya adalah anggaran yang masih diblokir.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rencana tindak lanjut terkait anggaran yaitu berkoordinasi dengan eselon I untuk pembukaan blokir anggaran jika memungkinkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Sampai dengan TW II belum ada realisasi anggaran pada indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya karena anggaran masih dilakukan blokir.

IKSK 13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Klaster komoditas unggulan budidaya air laut berbasis kawasan merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berkaitan dengan komoditas laut dalam suatu kawasan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing, efisiensi produksi, dan nilai tambah bagi komoditas budidaya laut tersebut. Klaster komoditas unggulan budidaya air laut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan menjadi komoditas ekspor. Pengembangan klaster budidaya laut dengan komoditas unggulan bertujuan meningkatkan produksi, efisiensi dan daya saing di pasar internasional.

Indikator Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan ini merupakan kegiatan Pembangunan Klaster komoditas unggulan ikan air laut berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh BLUPPB Karawang. Komoditas yang akan dikembangkan adalah kekerangan dengan membangun instalasi budi daya kekerangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan sebagaimana pada Tabel 22.

Tabel 20. Capaian Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	1	-	-	-	-

Sesuai pada tabel 22 dapat dilihat bahwa pada Triwulan II belum ada realisasi. Hal ini karena taget tahunan terdapat pada Triwulan IV tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 1 (unit) kluster yang sudah dibangun. Pada triwulan II capaian ini belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi progres untuk kegiatan ini tetap dilakukan yaitu melakukan penyiapan-penyiapan dokumen terkait dengan kebijakan perikanan budidaya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam pencapaian target pada Triwulan IV nanti adalah dengan melakukan inventarisasi kegiatan dan capaian progress Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan dengan BLUPPB Karawang.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 untuk pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang sebesar Rp1.619.193.225,- atau sebesar 16,19% dari pagu sebesar Rp10.000.000.000,- (belum dipotong efisiensi). Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang berasal dari rupiah murni (APBN) dan penerimaan BLU. Selain itu, kegiatan pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang mendapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp8.292.360.000,- (82,92%).

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima. Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 14. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut

sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 21. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	81,55	84	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84 (Nilai) dan pada Triwulan I, indikator belum bisa dihitung dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024 dan 2025 diukur pada akhir tahun. Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut tahun 2024 sebesar 81,55 % sedangkan pada triwulan II tahun 2025 ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan II, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain: Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/> sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

Kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target indikator ini adalah beberapa IKU yang menjadi target adalah kegiatan/pekerjaan dari beberapa UPT DJPB sehingga data sering harus menunggu untuk dikumpulkan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk triwulan selanjutnya adalah melakukan penyusunan dokumen kinerja lebih awal agar pengumpulan dokumen yang dilakukan setiap triwulan bisa tepat waktu dan dapat segera diupload dokumen tersebut ke aplikasi aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

IKSK 15. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

- b) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin.

- 1) Indikator dimensi **kualifikasi** yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan

- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10		

- 2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi **kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:
- a) Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b) Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- 3) Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 4) Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman

- Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
 - Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

$$IP \text{ ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Tabel 22. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	84,18	81	74	77,9	105,3	96,17

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

- **Capaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, realisasi Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut mencapai 77,9. Capaian ini melampaui target triwulan sebesar 74 (105,3%) dan telah mencapai 96,2% dari target tahunan sebesar 81. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Tahun Anggaran 2024 mencapai angka 84,18 pada Triwulan IV, yang sekaligus menjadi capaian tahunan. Angka ini mencerminkan tingkat profesionalitas ASN yang CUKUPt tinggi di akhir tahun berjalan.

Sementara itu, capaian pada Tahun Anggaran 2025 hingga Triwulan II tercatat sebesar 77,90, yang secara nominal menunjukkan selisih penurunan dibanding capaian akhir tahun sebelumnya. Namun demikian, angka ini masih bersifat sementara karena belum mencakup kinerja hingga akhir tahun. Capaian tersebut merefleksikan posisi sementara yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui berbagai program penguatan kompetensi dan optimalisasi peran ASN di sisa waktu tahun berjalan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Dengan mempertimbangkan tren capaian tahunan sebelumnya, Satker Direktorat Ikan Air Laut menargetkan peningkatan kinerja ASN di semester kedua tahun 2025 agar capaian indeks profesionalitas mendekati atau melampaui tingkat yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Kendala atas rencana aksi untuk mencapai target adalah masih ada pegawai yang memiliki nilai IP ASN yang masih rendah.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Pegawai Direktorat Ikan Air Laut menargetkan peningkatan capaian kinerja pada Semester II dengan berfokus pada perbaikan nilai kinerja individu maupun unit kerja. Upaya tersebut akan didukung melalui peningkatan kompetensi pegawai, antara lain dengan mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja. Melalui langkah ini, diharapkan kinerja Direktorat Ikan Air Laut dapat terus meningkat secara berkelanjutan

IKSK 16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- Entitas yang diperiksa oleh BPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
- Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Pengelola keuangan negara melaporkan Penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Tabel 23. Capaian Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	100	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (%). Pada triwulan II capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penyelesaian temuan dan belum ada kendala atas rencana aksi ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya terhadap indikator kinerja ini adalah mengumpulkan data untuk penyelesaian temuan BPK yang ada di Satker Direktorat Ikan Air Laut.

IKSK 17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Ikan Air Laut.

Tabel 24. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
95,65	92,68	85	85	87,5	102,9	102,9

- **Capaian Kinerja**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut tercatat sebesar 87,5%. Angka ini melampaui target triwulan maupun target tahunan sebesar 85, dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 102,9%. Capaian ini mencerminkan optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Pada tahun 2024, capaian realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut mencapai 115,85%. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sebesar 87,5%, atau 102,9% terhadap target tahunan. Meskipun terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja pada tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang positif karena telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan di lingkup DJPB mencapai 94,12%, dengan 240 dari 255 rekomendasi telah diselesaikan. Pada level unit kerja, Direktorat Ikan Air Laut mencatat capaian tindak lanjut sebesar 87,50%, yang menempatkannya di bawah rata-rata capaian lingkup DJPB. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain di lingkungan KKP, capaian tersebut masih berada di bawah beberapa direktorat dan UPT yang berhasil mencapai angka 94,12% hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Ikan Air Laut.

Tabel 25. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	93,44
2	Direktorat Ikan Air Laut	87,50
3	Direktorat Rumput Laut	89,19
4	Direktorat Ikan Air Tawar	94,12
5	Direktorat Ikan Air Payau	100,00

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Upaya yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), yaitu mengupayakan langkah tindak lanjut terkait dengan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui Surat T.202/ITJ.3/HP.550/IV/2025, 11 April 2025 mengenai Revisi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP Triwulan I TA 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang didalamnya menginformasikan bahwa adanya sisa temuan yang tercantum pada LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 di Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan sisa sebanyak satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan sebesar Rp41.426.478,00 belum dilengkapi dengan bukti dukung.

IKSK 18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari capaian rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 5 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur. Pengukuran dilakukan dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 85%
- Pengelolaan BMN = 85%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

$$\text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} = \frac{\text{jumlah pengukuran terhadap 5 aspek}}{\text{jumlah aspek yang diukur}} \times 100\%$$

Tabel 26. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
99,18	94,77	80	-	-	-	-

- **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut. Jumlah Pegawai Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang PNS, 4 (empat) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 5 (lima) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada tahun 2025 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga.

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Ikan Air Laut mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2025. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat.

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Ikan Air Laut yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2025 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat.

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :

- a) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- b) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- c) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

- **Capaian Kinerja**

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja ini adalah 80 (%). Pada triwulan II capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada triwulan II tahun 2024 sudah terdapat capaian sebesar 99,18 % karena indikator ini dilakukan pengukuran setiap triwulan pada tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 pengukuran untuk indikator kinerja ini dilakukan di akhir tahun sehingga pada triwulan II tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penilaian Kehadiran pegawai, Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN, Layanan tata usaha dan Pengelolaan SDM Aparatur dan belum terdapat kendala atas rencana aksi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya terhadap indikator kinerja ini adalah mengumpulkan data Kehadiran pegawai, Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN, Layanan tata usaha dan Pengelolaan SDM Aparatur dan belum terdapat kendala atas rencana aksi hingga periode pengukuran nanti di akhir tahun.

IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Tabel 27. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun 2024	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	70	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut adalah 70 (nilai). Pada triwulan I capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penilaian oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan dan belum terdapat kendala dalam prosesnya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk triwulan selanjutnya adalah melakukan proses mendokumentasikan arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah dengan baik di Direktorat Ikan Air Laut dengan.

IKSK 20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Indikator Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tabel 28. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW II	Tahun	Tahunan	TW II	TW II	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	65	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Target tahunan Indikator kinerja Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut adalah sebesar 65 (%) dan pada Triwulan II belum ada realisasi dikarenakan pengukuran capaian dilaksanakan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses pembuatan draft SOP dan belum terdapat kendala dalam prosesnya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk triwulan selanjutnya adalah melanjutkan proses pembuatan draft SOP Direktorat Ikan Air Laut untuk penilaian di akhir tahu.

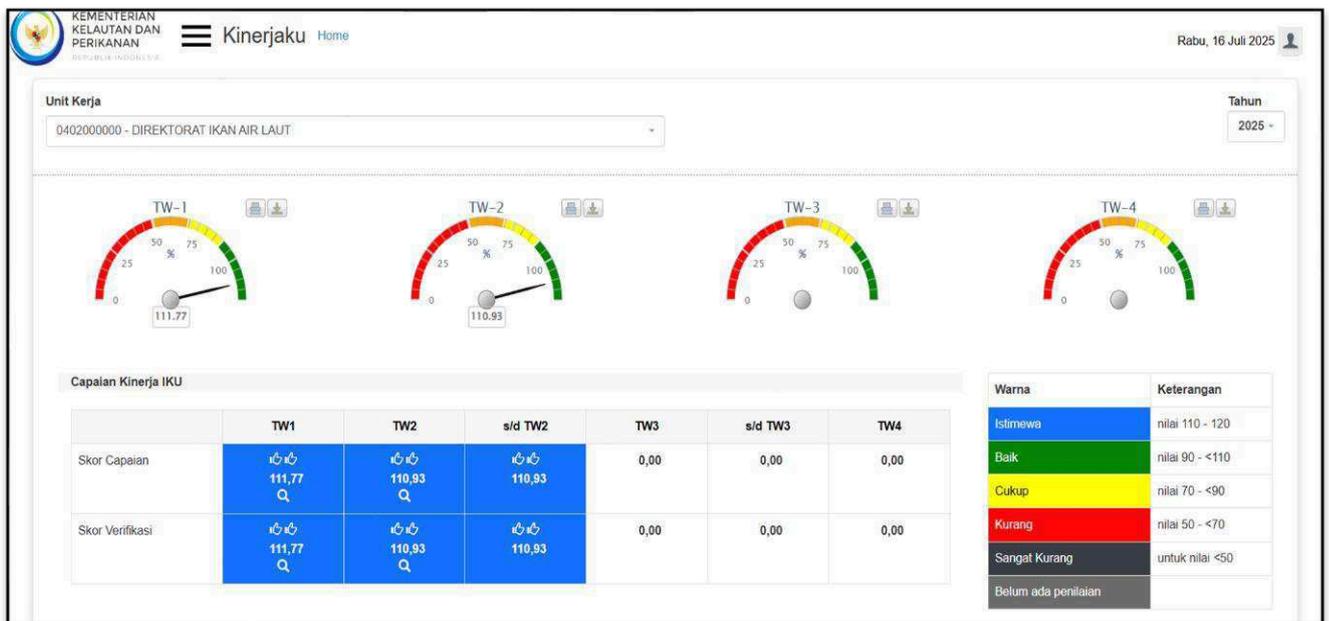
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Ikan Air Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Januari – Maret 2025. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pendukung sasaran kegiatan, sebanyak 10 (sepuluh) Indikator Kinerja telah melampaui target triwulan yang telah ditetapkan atau >100%, dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II. Seluruh capaian Indikator kinerja Triwulan II Tahun 2025 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada Triwulan I mencapai nilai angka “Istimewa”



Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II Tahun 2025

B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Ikan Air Laut merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait, sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan II Tahun 2025 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025, diketahui bahwa dari 20 (dua puluh satu) Indikator kinerja baru 10 (sepuluh) Indikator kinerja yang dapat diukur pencapaiannya sedangkan capaian 10 indikator kinerja lainnya belum dapat diukur pada Triwulan II. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diantaranya: 1) Anggaran untuk IKU yang menjadi target masih diblokir sehingga kegiatan belum dapat dijalankan, diharapkan terus dapat dilakukan koordinasi dengan tim kerja Program dan perencanaan di eselon I terkait dengan proses pembukaan blokir anggaran, 2) Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, belum seluruhnya tuntas ditindaklanjuti sehingga perlu upaya dalam penyelesaian hasil review terkait, dan 3) Pegawai yang nilai IP ASN nya masih rendah dapat mengikuti seminar/program/bimtek untuk menaikkan nilainya.

Diharapkan Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Ikan Air Laut sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada Triwulan berikutnya.